



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat, 25 Juli 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



LAPORAN: Suasana rapat paripurna DPRD Sidoarjo.

Penolakan LPJ Bupati Berdampak pada Perubahan APBD 2025

KOTA - Penolakan DPRD Sidoarjo terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APBD 2024 berbuntut panjang. Selain memicu

ketegangan hubungan politik antara legislatif dan eksekutif, penolakan ini juga berdampak langsung terhadap proses pengesahan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK) 2025. Hal ini terungkap dari hasil konsultasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) • Ke Halaman 10

Warga Demo Desak Penjelasan Penggunaan APBD 2024



SIDOARJO - Puluhan warga dari Aliansi Rakyat Merdeka unjuk rasa ke DPRD Sidoarjo kemarin (24/7). Mereka meminta dewan segera menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Sidoarjo. Desakan ini mencuat menyusul penolakan terhadap raperda laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024. "Kami menilai penggunaan anggaran tahun ini jauh dari harapan rakyat," tegas Husain, juru bicara Aliansi Rakyat Merdeka kemarin (24/7). Husain mengungkapkan ada dugaan bahwa pengelolaan APBD 2024 bermasalah. Hal itu merujuk dari hasil audit BPK RI menemukan sejumlah temuan krusial terkait kesalahan dalam penganggaran belanja barang, jasa, hingga belanja modal. "Karena itu DPRD harus menggunakan hak interpelasi sebagai bentuk kontrol politik. DPRD wajib meminta penjelasan resmi dari Bupati terkait kebijakan anggaran ini," ujarnya. (eza/uzi)

Gelar Kejurnas Voli Pantai Antarklub U-17 MAVI Cup 2025

Sidoarjo, Memorandum

Memperingati Hari Bhayangkara ke-79 tahun, sebanyak 25 tim putra dan 24 tim putri berlaga mengikuti kejuaraan nasional (kejurnas) voli pantai antarklub U17 MAVI Cup di lapangan voli pantai Sidoarjo. Event ini akan berlangsung selama lima hari (23-27 Juli).

Beberapa daerah yang punya basis voli pantai seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) DKI Jakarta, Jawa Barat Jawa Tengah, Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Bengkulu dan Jawa Timur.

Ketua pelaksana Djoko Supriyadi menjelaskan, ajang bergengsi voli pantai tingkat nasional yang digagas Mantan Atlet Voli Indonesia (MAVI) bekerja sama dengan PBVSI Sidoarjo ini, selain mencari bibit atlet yang

berbakat. Selain itu, juga untuk memberikan kesempatan pemain muda mengasah mental tanding menghadapi event yang lebih besar.

"Ya ini merupakan salah satu kejuaraan bergengsi tingkat nasional dalam rangka HUT Bhayangkara ke 79. Meski masih tingkat junior atau U-17 tapi kejuaraan ini sangat bergengsi sekali. Terbukti ada ratusan atlet dari 11 provinsi ikut ambil bagian," jelas Djoko Supriyadi.

Wakapolresta Sidoarjo Kombespol I Made Bayu Sutha Sartana yang membuka kejurnas mewakili kapolresta, menyambut antusias tim yang berlaga dalam kejuaraan ini. Ia mengatakan, kejurnas ini momen tepat untuk menguji mental tanding pemain muda, sekaligus para pelatih untuk menyusun taktik dan strategi dalam menghadapi pertandingan di kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional.

"Sebagai wujud kepedulian dan perhatian Polri di dunia olahraga, di peringatan Hari Bhayangkara ke-79 kami mendukung penuh potensi atlet-atlet muda voli pantai. Agar dapat terus meningkatkan prestasi di kancah kejuaraan lebih tinggi," ungkapnya. (sud/san/epc)



Kejurnas voli pantai antarklub U-17 MAVI Cup 2025.

DPRD Tetap Bahas Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2025



M Ainur Rahman

Pemkab Konsultasi ke Kemendagri Pasca Penolakan LPJ

SIDOARJO - Penolakan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 oleh sejumlah fraksi dalam paripurna pekan lalu bisa berdampak pada proses pembahasan perubahan anggaran

keuangan (PAK) APBD 2025. Namun, DPRD Sidoarjo memastikan PAK bisa tetap dibahas meski raperda ditolak.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo M Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil konsultasi merekomen-

dasikan agar Pemkab dan DPRD tetap berupaya menerbitkan Perda Pertanggungjawaban, bukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ainur menyebut LPJ dan PAK sebenarnya dua hal berbeda, namun aturan PP 12/2019 menyebut PAK hanya bisa disahkan jika perda LPJ sudah ditetapkan. Sementara itu, Anggota DPRD

Sidoarjo Bangun Winarso menegaskan, meskipun LPJ nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menurutnya PAK tetap bisa dibahas.

"Bisa saja menurut kami. Kami juga sudah mendatangkan tenaga ahli. Secara statusnya, perkada itu sama dengan perda," imbuhnya. (eza/uzi)

Puslitbang Polri Tinjau Kendaraan Operasional di Polresta Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum Tim dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri kegiatan penelitian dan evaluasi terhadap kendaraan dinas operasional di Polresta Sidoarjo. Setelah sesi pembukaan, Tim Puslitbang melakukan pengecekan kendaraan dinas dari berbagai satuan Samapta dan Binmas. Pemeriksaan dilaku-



Puslitbang Polri di Mapolresta Sidoarjo.

kan di lapangan apel Polresta Sidoarjo, dilanjutkan dengan wawancara dan pendalaman data teknis kendaraan. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan dinas masih dalam

kondisi layak pakai. Tim Puslitbang Polri mengapresiasi upaya perawatan rutin kendaraan dinas operasional yang dilakukan Polresta Sidoarjo. "Untuk kendaraan yang mengalami penurunan per-

forma, telah dicatat untuk ditindaklanjuti dalam program pemeliharaan sehingga nanti dapat menunjang pelaksanaan dinas anggota dalam melayani masyarakat," ujar Brigjenpol FX Surya Kumara. (sar/day)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LAPORAN: Suasana rapat paripurna DPRD Sidoarjo.

Penolakan LPJ Bupati Berdampak pada Perubahan APBD 2025

KOTA - Penolakan DPRD Sidoarjo terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan APBD 2024 berbuntut panjang. Selain memicu

ketegangan hubungan politik antara legislatif dan eksekutif, penolakan ini juga berdampak langsung terhadap proses pengesahan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK) 2025.

Hal ini terungkap dari hasil konsultasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

● Ke Halaman 10

 **RADAR**
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Demo Desak Penjelasan Penggunaan APBD 2024



ANGGER BONDAN/JAWA POS

SIDOARJO - Puluhan warga dari Aliansi Rakyat Merdeka unjukrasa ke DPRD Sidoarjo kemarin (24/7). Mereka meminta dewan segera menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Sidoarjo. Desakan ini mencuat menyusul penolakan terhadap raperda laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024.

"Kami menilai penggunaan

SAMPAIKAN ASPIRASI: Aliansi Rakyat Merdeka berdemo di depan kantor DPRD Sidoarjo menuntut DPRD menggunakan interpelasi ke bupati Sidoarjo pasca penolakan LPJ 2024, kemarin (24/7).

anggaran tahun ini jauh dari harapan rakyat," tegas Husain, juru bicara Aliansi Rakyat Merdeka kemarin (24/7). Husain mengungkapkan ada dugaan bahwa pengelolaan APBD 2024 bermasalah.

Hal itu merujuk dari hasil audit BPK RI menemukan sejumlah temuan krusial terkait kesalahan dalam penganggaran belanja barang, jasa, hingga belanja modal. "Karena itu DPRD harus menggunakan hak interpelasi sebagai bentuk kontrol politik. DPRD wajib meminta penjelasan resmi dari Bupati terkait kebijakan anggaran ini," ujarnya. (*eza/uzi*)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ DPRD Tetap Bahas Perubahan Anggaran Keuangan APBD 2025



M Ainur Rahman

Pemkab Konsultasi ke Kemendagri Pasca Penolakan LPJ

SIDOARJO – Penolakan pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024 oleh sejumlah fraksi dalam paripurna pekan lalu bisa berdampak pada proses pembahasan perubahan anggaran

keuangan (PAK) APBD 2025. Namun, DPRD Sidoarjo memastikan PAK bisa tetap dibahas meski raperda ditolak.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rahman mengatakan, Pemkab Sidoarjo sudah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil konsultasi merekomen-

dasikan agar Pemkab dan DPRD tetap berupaya menerbitkan Perda Pertanggungjawaban, bukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Ainur menyebut LPJ dan PAK sebenarnya dua hal berbeda, namun aturan PP 12/2019 menyebut PAK hanya bisa disahkan jika perda LPJ sudah ditetapkan.

Sementara itu, Anggota DPRD

Sidoarjo Bangun Winarso menegaskan, meskipun LPJ nantinya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menurutnya PAK tetap bisa dibahas.

"Bisa saja menurut kami. Kami juga sudah mendatangkan tenaga ahli. Secara statusnya, perkada itu sama dengan perda," imbuhnya. **(eza/uzi)**

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

MUDAHKAN ATLET: Mohammad Eko Purwanto (kiri) dan Faiz Kurniawan (tengah), pelatih inline skate, mendengarkan penjelasan Andre Aditya Pradana tentang penggunaan aplikasi Sains Skate Support, buatan tim Fisioterapi Umsida, kemarin (24/7).

Umsida Bikin Aplikasi Pemantau Performa Atlet Sepatu Roda

SIDOARJO – Prodi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) membuat aplikasi untuk pembinaan atlet sepatu roda. Aplikasi dengan nama Sains Skate Support itu bisa menganalisis data performa atlet.

"Aplikasi ini akan menjadi terobosan dalam dunia pembinaan atlet, karena berbasis data sains dan teknologi," ujar Ketua Tim Pengembangan Aplikasi Widi Arti.

Aplikasi tersebut dirancang

untuk merekam dan menganalisis berbagai data performa atlet, mulai dari riwayat latihan, kondisi fisik, hingga analisis biomekanik. Di dashboard aplikasi, pelatih dan atlet dapat melihat grafik kecepatan, stamina, akselerasi, hingga teknik start.

Aplikasi ini juga memberikan rekomendasi latihan personal, laporan risiko cedera, serta peringatan dini untuk mencegah *overtraining*. (eza/uzi)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO

DALAM ANGKA

PENDUDUK MISKIN DI SIDOARJO DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR



JUMLAH penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sidoarjo menunjukkan fluktuatif dalam lima tahun terakhir. DTKS menjadi acuan untuk pemberian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. (eza/uzi)

Jawa Pos

Puslitbang Polri Tinjau Kendaraan Operasional di Polresta Sidoarjo



Sidoarjo,

Memorandum

Tim dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melaksanakan kegiatan penelitian dan evaluasi terhadap kendaraan dinas operasional di Polresta Sidoarjo, Selasa (22/7).

Hadir di Mako Polresta Sidoarjo Kapuslitbang Polri Brigjenpol FX Surya Kumara, Kombespol Guno Pitoyo, narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr Eng Gadang Pritotomo, serta Waka Polresta Sidoarjo Kombespol I Made Bayu Sutha Sartana, Kasat Samapta Polresta Sidoarjo Kompol Yudhi Prastio serta sejumlah pejabat Polresta Sidoarjo.

Setelah sesi pembukaan, Tim Puslitbang melakukan pengecekan kendaraan dinas dari berbagai satuan Samapta dan Binmas. Pemeriksaan dilaku-



Puslitbang Polri di Mapolresta Sidoarjo.

kan di lapangan apel Polresta Sidoarjo, dilanjutkan dengan wawancara dan pendalaman data teknis kendaraan.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan dinas masih dalam

kondisi layak pakai. Tim Puslitbang Polri mengapresiasi upaya perawatan rutin kendaraan dinas operasional yang dilakukan Polresta Sidoarjo.

"Untuk kendaraan yang mengalami penurunan per-

forma, telah dicatat untuk ditindaklanjuti dalam program peremajaan sehingga nanti dapat menunjang pelaksanaan dinas anggota dalam melayani masyarakat," ujar Brigjenpol FX Surya Kumara. (san/day)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Peringati Hari Bhayangkara Ke-79 Tahun

Gelar Kejurnas Voli Pantai Antarklub U-17 MAVI Cup 2025

Sidoarjo, Memorandum

Memperingati Hari Bhayangkara ke-79 tahun, sebanyak 25 tim putra dan 24 tim putri berlaga mengikuti kejuaraan nasional (kejurnas) voli pantai antarklub U17 MAVI Cup di lapangan voli pantai Sidoarjo. *Event* ini akan berlangsung selama lima hari (23-27 Juli).

Beberapa daerah yang punya basis voli pantai seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) DKI Jakarta, Jawa Barat Jawa Tengah, Lampung, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Bengkulu dan Jawa Timur.

Ketua pelaksana Djoko Supriyadi menjelaskan, ajang bergengsi voli pantai tingkat nasional yang digagas Mantan Atlet Voli Indonesia (MAVI) bekerja sama dengan PBVSI Sidoarjo ini, selain mencari bibit atlet yang

berbakat. Selain itu, juga untuk memberikan kesempatan pemain muda mengasah mental tanding menghadapi *event* yang lebih besar.

"Ya ini merupakan salah satu kejuaraan bergengsi tingkat nasional dalam rangka HUT Bhayangkara ke 79. Meski masih tingkat junior atau U-17 tapi kejuaraan ini sangat bergengsi sekali. Terbukti ada ratusan atlet dari 11 provinsi ikut ambil bagian," jelas Djoko Supriyadi.

Wakapolresta Sidoarjo Kombespol I Made Bayu Sutha Sartana yang membuka kejurnas mewakili kapolresta, menyambut antusias tim yang berlaga dalam kejuaraan ini. Ia mengatakan, kejurnas ini momen tepat untuk menguji mental tanding pemain muda, sekaligus para pelatih untuk menyusun taktik dan strategi dalam menghadapi pertandingan di kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional.

"Sebagai wujud kepedulian dan perhatian Polri di dunia olahraga, diperingati Hari Bhayangkara ke-79 kami mendukung penuh potensi atlet-atlet muda voli pantai. Agar dapat terus meningkatkan prestasi di kancah kejuaraan lebih tinggi," ungkapnya. (sud/san/epe)



Kejurnas voli pantai antarklub U-17 MAVI Cup 2025.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Alfamart menyerahkan bantuan mesin jahit ke perajin Intako, Kamis (24/7).

Alfamart Beri Bantuan Mesin Jahit Bagi Perajin Intako

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) memberikan bantuan satu set mesin jahit baru dan meja jahit modern kepada Muchlis Usman, 54, salah satu perajin Industri Tas dan Koper (Intako) Tanggulangin Sidoarjo.

Bantuan mesin jahit ini diserahkan secara simbolis oleh perwakilan manajemen Alfamart kepada Muchlis Usman, Kamis (24/7).

Muchlis menjadi salah satu penjahit yang beruntung di antara penjahit Intako lainnya yang mendapat bantuan mesin jahit pada saat menerima order menjahit 4.000 pcs tas jumbo untuk wadah goody bag kegiatan Alfamart RUN yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang.

"Bapak Muchlis ini kami beri

bantuan CSR karena beliau dari awal sudah terlibat dalam pembuatan desain dan penjahitan tas contoh, yang kemudian kita revisi berkali-kali. Beliau ini sabar dan telaten mengirim revisiannya ke kantor Head Office kami di Tangerang," cetus Corporate Communication Alfamart, Ame Dwi Pramesti.

Bagi Muchlis Usman, mendapatkan 1 set mesin jahit baru sepaket dengan meja jahit modern, seperti mendapatkan semangat baru.

Bagaimana tidak, 40 tahun ia mendedikasikan diri sebagai perajin Intako hanya bermodal 1 unit mesin jahit tua peninggalan almarhum orangtuanya.

Apalagi, kondisi orderan Intako yang dari waktu ke waktu tidak lebih dibandingkan 10-15

tahun silam.

"Penjahit tidak saja butuh ketelitian dalam bekerja, tapi juga keikhlasan pada saat sepi order," katanya di sela serah terima bantuan mesin jahit merk Typical GC 202 dilengkapi dinamo dengan kecepatan hingga 3.500 jahitan permenit.

Kepedulian Alfamart melibatkan UMKM lokal dalam jaringan Intako dalam menjahit 4000 tas untuk Alfamart RUN ini membuat Muchlis kembali mendapatkan angin segar.

"Alhamdulillah rejeki tidak akan kemana-mana. Terima kasih Alfamart dan Intako," ujar bapak 2 anak yang terpilih mendapat bantuan karena sejak awal ia rela bolak balik menjahit dan merevisi beberapa tas contoh untuk acara tersebut. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Tandatangani Komitmen Bersama Akselerasi Penerapan Manajemen Talenta



PJ PROGRESJATIM.COM
Jendela Informasi Anda



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Progresjatim.com, Sidoarjo – Rapat Koordinasi/Rakor Evaluasi CASN dan Manajemen Talenta digelar Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pendapa Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7). Salah satu isu prioritas yang dibahas adalah manajemen talenta ASN. Seluruh kepala daerah di Jawa Timur hadir mengikutinya. Termasuk Bupati Sidoarjo H. Subandi. Kehadiran 38 kepala daerah di Jatim itu bersama Sekda serta kepala BKD masing-masing.

Rakor dipimpin langsung Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh bersama Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa. Dalam Rakor tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama akselerasi penerepan manajemen talenta oleh seluruh kepala daerah.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa manajemen talenta akan menggantikan metode sebelumnya seperti open bidding dan job fit. Sistem baru tersebut dinilai lebih cepat dan efektif serta mampu menempatkan ASN secara tepat sesuai kompetensinya masing-masing.

"Proses seleksi dan penempatan akan dilakukan melalui satu pintu untuk memastikan transparansi, efisiensi serta efektivitas dan hasilnya pasti akan lebih bagus,"ujarnya.

Disampaikannya bahwa secara nasional sudah ada sekitar 200 instansi yang telah membangun sistem manajemen talenta. Namun baru 30 instansi yang sudah menerapkannya penuh. Ia berharap penerapan sistem tersebut akan meningkat signifikan dengan dukungan Jawa Timur.

"Saya apresiasi Ibu Gubernur, karena dengan 38 daerah menandatangani komitmen ini, angka nasional akan langsung meningkat," ujar Zudan.

Bupati Sidoarjo H. Subandi sendiri menyatakan komitmennya untuk melaksanakannya. Menurutnya penerapan sistem manajemen talenta ASN merupakan upaya mempercepat reformasi birokrasi. Selain itu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Ini menjadi langkah strategis yang harus didukung bersama demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik,"ucapnya. (GUS)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dinas PUBM dan SDA Sidoarjo Teken Berita Acara Rencana Tindak Darurat Penanganan Bencana Banjir Bendungan Bening Madiun



Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo resmi menandatangani berita acara Rencana Tindak Darurat (RTD) Penanganan Bencana Bendungan Bening, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun bersama enam kabupaten/kota lain di Jawa Timur di De Resort Hotel, Mojokerto, Kamis (24/07/2025). Penandatanganan ini menjadi simbol kesiapsiagaan lintas wilayah dalam menghadapi potensi bencana yang berasal dari Bendungan Bening.

Enam daerah yang ikut serta dalam kesepakatan itu meliputi Kabupaten Sidoarjo, Nganjuk, Madiun, Mojokerto, serta Kota Madiun dan Kota Mojokerto. Kesepakatan ini digagas Jasa Tirta 1 sebagai bagian dari upaya penguatan mitigasi bencana dan sistem koordinasi antardaerah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah antisipatif ini. Khususnya dalam penguatan infrastruktur pengendali banjir dan jalur evakuasi.

"Dari sisi teknis, kami akan menyesuaikan rencana pemeliharaan infrastruktur pengairan dan jalan di wilayah terdampak untuk mendukung upaya mitigasi ini. Koordinasi lintas sektor sangat penting agar respon cepat bisa dilakukan secara maksimal," ujar Dwi Eko Saptono.



Lebih jauh Dwi menguraikan pihaknya siap bersinergi dengan daerah lain. Terutama dalam upaya penyelamatan masyarakat jika terjadi kondisi darurat.

"Langkah ini penting untuk memastikan tanggung jawab semua pihak dalam menangani mitigasi bencana banjir akibat kerusakan Bendungan Bening," paparnya.

Sementara Kepala Divisi Perum (Perusahaan Umum) Jasa Tirta 1, Arif menyebut usia Bendungan Bening yang mencapai 43 tahun. Namun, kondisinya masih baik. Bahkan pengendapan sedimentasi masih bisa ditangani dan diatasi dengan baik.



"Meskipun usianya sudah mencapai 43 tahun, kapasitas bendungan saat ini masih bagus yaitu 80 persen dari kondisi awal. Terlihat sedimentasinya masih bisa ditangani dengan baik. Diharapkan potensi bencana tidak terjadi. Hanya saja saat ini kita bersama-sama untuk mitigasi bencana," katanya usai penandatanganan berita acara saat sosialisasi dan FGD RTD Bendungan Bening.

Sebagai informasi, kata Arif Bendungan Bening merupakan salah satu bendungan strategis di Jawa Timur yang memiliki potensi dampak besar jika terjadi kerusakan (jebol). Air yang berasal dari bendungan ini mengalir ke sejumlah daerah hilir, termasuk wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Dengan penandatanganan berita acara ini, enam kabupaten/kota sepakat memperkuat koordinasi serta pemutakhiran data wilayah terdampak. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkecil risiko korban jiwa dan kerugian material apabila bencana banjir terjadi," pungkasnya. Ary/Waw

